

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL MELALUI BAITUL MAAL WAT TAMWIL

Financing Agreement By Profit Sharing System In Baitul Maal Wat Tamwil

Reh Bungana br PA¹, Siti Ismijati Jenie², Taufiq El Rahman²

*Program Studi Magister Hukum
Sekolah pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

Research about Financing Agreement by Profit Sharing System in *Baitul Maal Wat Tamwil* was a normative juridical research, that was a research that based on library research. The purposes of this research were:

1. to find out the way of making financing agreement by profit sharing in BMT.
2. to find out the performance of profit sharing system in financing agreement in BMT.
3. to find out the settlement if the debtor didn't perform his obligation.

The conclusions of this research were:

1. financing agreement between BMT and debtor was made written that form and its contents had been fixed by BMT before. So, the financing agreement between BMT and debtor did not have to be done at BMT. The making of financing agreement between BMT and debtor can be done at debtor's place.
2. the financing that used *syirkah* agreement (profit sharing) were *mudharabah* and *musyarakah*. To fix profit sharing for the financing by *syirkah* principle was by fix the portion of profit sharing in the beginning of the agreement. Usually there were two ways that were used as base in taking profit sharing, they were revenue or profit.
3. in case debtor didn't perform his obligation then BMT settled with *silaturahmi*. It was meant to keep the good relationship between BMT and debtor. BMT in handled debtor who didn't perform his obligation never go to the court, because the settlement in court would need a long time and a big cost.

Key words : *financing agreement, profit sharing, Baitul Maal Wat Tamwil.*

¹ Jln. Madjend Sutoyo Gg. Wajar No. 12, Binjai.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

PENGANTAR

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk "*Baitul Maal Wat Tamwil*" yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan *riba* (bunga) secara tegas dalam Al-Qur'an (Ilmi, 2002 : 1). Islam menganggap *riba* sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan *riba*.

Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Dengan berdirinya banyak BMT, bukan berarti semua BMT maju dengan baik. Akan tetapi ada juga BMT yang mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan. Namun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan BMT yang maju. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Junaidi (Karim, 2000), ternyata kebanyakan BMT yang ada di lapangan, asetnya berkisar Rp. 10-30 juta atau sekitar 51%-nya berada pada kategori Rp. 10-30 juta-an. Memang ada BMT-BMT yang besar yang di atas Rp. 100 juta di luar KUT, ternyata jumlahnya 5%. Berdasarkan hasil penelitian Junaidi, ternyata BMT-BMT yang mempunyai aset bermasalah tidak lebih dari 10% atau ternyata cuma 7% dari total BMT, sedangkan yang lebih besar adalah BMT-BMT yang tidak punya masalah. Aset yang bermasalah ini merupakan kredit macet yang disebabkan oleh nasabah BMT yang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

BMT adalah singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (diterjemahkan secara bebas menjadi Balai-Usaha Mandiri Terpadu) merupakan sebuah lembaga ekonomi yang menggalang kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin dengan prosedur sederhana, gampang dan tidak mencekik leher dan berdasarkan sistem bagi hasil.

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. *Baitul Tamwil* bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Adapun *Baitul Maal* menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sesuai dengan prinsip bagi hasil, maka hubungan antara BMT sebagai pemodal dan pengusaha kecil tidaklah hanya terbatas sebagai hubungan antara bankir dan nasabah, di mana bankir tidak mencampuri urusan

usaha nasabah. Hubungan antara BMT dan pengusaha merupakan hubungan hukum yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian antara BMT dan pengusaha merupakan perjanjian tertulis yang dibuat sebelum pengusaha memperoleh pembiayaan. Perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara BMT dan pengusaha terdiri atas Akad Pembiayaan *Al Mudharabah* dan Akad Pembiayaan *Al Musyarakah*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pembuatan Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil melalui BMT?
2. Bagaimanakah Sistem Bagi Hasil dalam Perjanjian Pembiayaan melalui BMT itu dilaksanakan?
3. Bagaimanakah Penyelesaiannya apabila Nasabah tidak Melaksanakan Kewajibannya kepada BMT?

CARA PENELITIAN

Penelitian mengenai "Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil melalui *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)" merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif. Metoda Kualitatif adalah analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan sebenarnya di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembuatan Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil

a. Hasil Penelitian

Perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah dibuat secara tertulis yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh BMT terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah merupakan perjanjian baku, di mana BMT menyediakan formulir

pembiayaan yang memuat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BMT dan harus disetujui oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan.

Pembuatan perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah tidak harus dilakukan di BMT. Pembuatan perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah dapat dilakukan di tempat nasabah. Ini dinamakan sistem jemput bola. Dalam sistem jemput bola ini, pembuatan perjanjian itu dapat dilakukan di tempat usaha nasabah misalnya pasar atau di rumah nasabah. Hasil penelitian, tidak semua BMT menawarkan produk pembiayaan yang sama. Ada beberapa BMT yang tidak menawarkan produk pembiayaan tertentu karena dianggap sangat berisiko dan dapat menimbulkan kerugian bagi BMT.

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri atas produk pembiayaan *mudharabah* dan produk pembiayaan *musyarakah*. Walaupun demikian tidak semua BMT menawarkan produk pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian terhadap 3 (tiga) BMT, hanya jaringan BMT Amratani yang menawarkan produk pembiayaan *mudharabah*. Adapun BMT Bina Dhuafa Beringharjo dan BMT Al Iklas tidak menawarkan produk pembiayaan *mudharabah*. Pada umumnya BMT menyodorkan produk pembiayaan *musyarakah* sebagai alternatif pengganti dari produk pembiayaan *mudharabah*.

b. Pembahasan

Perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara BMT dan nasabah terdiri atas akad pembiayaan *mudharabah* dan akad pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi tidak semua BMT menawarkan produk pembiayaan *mudharabah*. Hal ini disebabkan besarnya risiko yang dihadapi oleh BMT, karena dalam pembiayaan *mudharabah* modal seluruhnya berasal dari BMT sedangkan BMT tidak diijinkan untuk ikut campur dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah. Selain itu, pada umumnya nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah nasabah yang baru akan memulai suatu usaha atau dengan kata lain nasabah yang belum mempunyai pengalaman tentang usaha yang akan dijalanakannya, sehingga dengan demikian risiko yang dihadapi BMT semakin besar. Hal ini disebabkan karena di satu sisi BMT tidak boleh mencampuri usaha nasabah karena pembiayaan *mudharabah* diberikan berdasarkan landasan kepercayaan sedangkan di sisi lain BMT belum mengetahui kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.

Perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara BMT dan nasabah menunjukkan karakteristik dari suatu perjanjian baku. Hal ini dikarenakan isi dan syarat-syarat dari perjanjian tersebut ternyata lebih

banyak ditentukan secara sepihak oleh BMT tanpa melibatkan nasabah serta bentuk perjanjian telah baku. Dikatakan baku karena perjanjian isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Jadi BMT sudah menyediakan blanko perjanjian pembiayaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Dalam kenyataannya terdapat kecenderungan transaksi yang tidak seimbang sebab kesepakatan yang terjadi melalui suatu formulir perjanjian dengan klausula-klausula yang telah dicetak sebelumnya dan selanjutnya disodorkan kepada pihak nasabah untuk disetujui. Proses tersebut telah melemahkan posisi hukum pihak nasabah karena peluang untuk merundingkan atau melakukan perubahan terhadap isi dan syarat-syarat dalam perjanjian yang dirasa memberatkannya sudah tertutup. Kalaupun ada peluang untuk mengadakan negosiasi, hanyalah sebatas pada jumlah dana yang akan diperoleh dalam pembiayaan, jangka waktu pembiayaan maupun mengenai besarnya porsi bagi hasil.

Jika ditinjau dari hukum perjanjian Islam, karena BMT merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang berdasarkan pada Hukum Islam, perjanjian baku bertentangan dengan asas-asas perjanjian dalam Hukum Islam yaitu bertentangan dengan Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*) dan Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*).

Walaupun dikatakan bahwa apabila asas-asas perjanjian menurut Hukum Islam tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat, namun tidak demikian halnya dalam perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah. Perjanjian tersebut tetap ada dan dijalankan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dilihat bahwa walau BMT merupakan lembaga keuangan syariah mikro, tapi pada pembuatan perjanjian pembiayaan BMT tidak sepenuhnya berdasarkan pada Hukum Islam.

Ditinjau dari Hukum Perdata, perjanjian baku merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari perkataan "semua" di atas dapat disimpulkan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan menentukan sendiri isi, bentuk, jenis perjanjian yang mengandung arti: setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian, untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga, untuk menentukan bentuk perjanjian dan untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Namun kebebasan itu bukanlah kebebasan yang mutlak karena dalam perkembangannya kebebasan itu dibatasi yaitu tidak dilarang oleh ketentuan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

umum.

Jika dihubungkan dengan bentuk perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah, secara teoritis yuridis, perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Dapat dilihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada nasabah untuk mengadakan "*real bargaining*" dengan BMT. Nasabah tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian baku.

Jika dihubungkan dengan perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah maka perjanjian baku antara BMT dan nasabah tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan perjanjian baku antara BMT dan nasabah tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil melalui BMT tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Pembiayaan melalui BMT

a. Hasil Penelitian

Hasil penelitian, menentukan bagi hasil untuk pembiayaan yang dilaksanakan dengan prinsip *syirkah* (kongsi) adalah dengan penentuan nisbah bagi hasil dari awal (ketika terjadi akad). Besarnya nisbah (porsi) bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian yaitu dalam hal ini BMT dan nasabah. Biasanya ada dua macam yang dipakai sebagai dasar pengambilan bagi hasil, yaitu dari pendapatan (*revenue*) atau dari laba (*profit*).

Hasil penelitian, sistem bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan melalui BMT tidak bersifat *fix* atau dengan kata lain perjanjian bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah dapat berubah sesuai dengan kondisi usaha nasabah. Adapun yang dapat dirubah dalam perjanjian bagi hasil antara BMT dan nasabah adalah mengenai besarnya proyeksi pendapatan dan porsi bagi hasil antara BMT dan nasabah.

b. Pembahasan

Sistem bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan melalui BMT tidak

bersifat *fix* artinya sistem bagi hasil antara BMT dan nasabah dapat berubah walau perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah sudah berjalan. Adapun yang dapat dirubah dalam perjanjian bagi hasil antara BMT dan nasabah adalah mengenai besarnya proyeksi pendapatan dan porsi bagi hasil antara BMT dan nasabah. Perubahan besarnya proyeksi pendapatan terjadi apabila dalam pelaksanaan perjanjian ternyata usaha yang dijalankan nasabah tidak memperoleh pendapatan sebesar proyeksi pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian, maka dalam hal ini nasabah dapat meminta kepada BMT untuk merubah besarnya proyeksi pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain dapat meminta agar besarnya proyeksi pendapatan yang ditetapkan sebelumnya dirubah, nasabah juga dapat meminta kepada BMT agar besarnya porsi bagi hasil antara BMT dan nasabah yang juga telah ditetapkan pada waktu pembuatan perjanjian dirubah. Perubahan porsi bagi hasil antara BMT dan nasabah terjadi apabila nasabah merasa bahwa besarnya porsi bagi hasil antara BMT dan nasabah memberatkan bagi nasabah.

3. Penyelesaian apabila Nasabah tidak melaksanakan Kewajibannya kepada BMT.

a. Hasil Penelitian

Hasil penelitian, nasabah dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya apabila :

1) Nasabah membayar angsuran terlambat atau menunggak.

Dari hasil penelitian, terhadap nasabah yang membayar angsuran terlambat atau menunggak maka langkah awal yang dilakukan BMT adalah mengunjungi nasabah. Apabila nasabah yang menunggak cukup banyak maka BMT mengadakan skala prioritas berdasarkan kemungkinan adanya pemasukan atau pembayaran tunggakan oleh nasabah dengan pedoman urutan (a) Pembiayaan Kurang Lancar, (b) Pembiayaan Diragukan, (c) Pembiayaan Macet.

2) Nasabah Mengkhianati Akad

Hasil penelitian, nasabah juga dikatakan tidak melaksanakan kewajiban apabila ternyata nasabah tidak menggunakan dana yang diberikan BMT untuk tujuan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Meskipun dalam hal ini nasabah membayar angsuran secara lancar kepada BMT. Kejadian seperti ini terjadi apabila dalam permohonan pembiayaan nasabah mengatakan bahwa dana yang diperoleh akan digunakan untuk menjalankan suatu usaha yang halal tetapi ternyata setelah pembiayaan berjalan, diketahui oleh BMT bahwa

dana yang diberikan oleh BMT tidak digunakan untuk melaksanakan usaha melainkan untuk keperluan lain seperti untuk membayar utang atau keperluan lainnya dan bukan untuk usaha seperti yang dikatakan pada waktu mengajukan permohonan pembiayaan maka BMT akan mengubah akad.

Hasil penelitian, BMT tidak pernah menempuh jalur hukum dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, menurut keterangan responden yang diwawancarai, apabila nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya mempunyai utang yang besar kepada BMT, maka BMT akan menyelesaikannya melalui jalur hukum.

b. Pembahasan

Dalam perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara BMT dan nasabah, nasabah dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya apabila nasabah membayar angsuran terlambat dan apabila nasabah mengkhianati akad yaitu dengan menggunakan dana yang diberikan oleh BMT untuk hal-hal selain usaha tetapi untuk keperluan pribadi misalnya nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh BMT untuk membayar utang.

Inilah yang membedakan antara BMT dan lembaga keuangan lainnya yang sama-sama memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan lain tidak akan memperdulikan apakah dana yang diberikan kepada nasabah itu digunakan oleh nasabah sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang telah dicantumkan dalam perjanjian atau tidak, sepanjang nasabah yang bersangkutan melakukan pembayaran angsuran secara lancar kepada lembaga keuangan tersebut. Tidak demikian halnya dalam perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara BMT dan nasabah. Dalam perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara BMT dan nasabah, nasabah wajib menggunakan dana yang telah diberikan oleh BMT untuk menjalankan usaha seperti yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah. Dalam hal ini apabila nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh BMT untuk tujuan selain menjalankan usaha sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian maka BMT akan merubah akad, meskipun dalam hal ini nasabah membayar angsuran secara lancar kepada BMT. Karena dengan demikian bagi hasil tidak sah karena sebenarnya tidak ada usaha yang dijalankan. Jika tidak ada usaha yang dijalankan maka tentunya tidak ada hasil yang bisa dibagi. Atas dasar pemikiran inilah maka BMT akan mengubah akad dari pembiayaan tersebut.

BMT dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu mengunjungi nasabah dan memberikan teguran-teguran. Semuanya dilakukan dalam suasana *silaturrahmi* dan kekeluargaan. BMT tidak pernah menempuh jalur hukum dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan pada umumnya nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT adalah pengusaha kecil yang besarnya jumlah pembiayaannya juga kecil. Oleh karena itu apabila ada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya akan diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, selain untuk menghemat biaya juga untuk tetap menjaga hubungan baik antara BMT dan nasabah. Penyelesaian melalui pengadilan merupakan jalan paling akhir yang dipilih oleh BMT dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah dibuat secara tertulis yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh BMT terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah merupakan perjanjian baku. Pembuatan perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah tidak harus dilakukan di BMT. Pembuatan perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah dapat dilakukan di tempat nasabah. Ini dinamakan sistem jemput bola. Dalam sistem jemput bola ini, pembuatan perjanjian itu dapat dilakukan di tempat usaha nasabah misalnya pasar atau di rumah nasabah.
- b. Pembiayaan yang menggunakan akad *syirkah* (bagi hasil) terdiri atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Menentukan bagi hasil untuk pembiayaan yang dilaksanakan dengan prinsip *syirkah* (kongsi) adalah dengan penentuan *nisbah* bagi hasil dari awal (ketika terjadi akad). Besarnya *nisbah* (porsi) bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian yaitu dalam hal ini BMT dan nasabah. Biasanya ada dua macam yang dipakai sebagai dasar pengambilan bagi hasil, yaitu dari pendapatan (*revenue*) atau dari laba (*profit*).
- c. Dalam hal nasabah tidak melaksanakan kewajibannya maka BMT menyelesaikan secara *silaturrahmi* dan kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga hubungan baik antara BMT dan nasabah. BMT dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak pernah menempuh jalur hukum, karena

penyelesaian melalui pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu apabila ada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya akan diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan.

2. Saran

- a. Perjanjian pembiayaan antara BMT dan nasabah merupakan perjanjian baku, di mana nasabah berada di posisi lemah. Oleh karena itu penulis menyarankan apabila nasabah hendak mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT, nasabah hendaknya benar-benar memahami penjelasan yang diberikan oleh BMT mengenai maksud dan isi perjanjian pembiayaan tersebut, sehingga tidak terjadi salah paham di antara kedua belah pihak tentang perjanjian tersebut.
- b. Dalam pelaksanaan bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* hendaknya BMT benar-benar menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip bagi hasil yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu apabila usaha yang dijalankan nasabah mengalami kerugian di luar kesalahan nasabah maka BMT hendaknya ikut menanggung kerugian tersebut dan tidak meminta agar nasabah mengembalikan seluruh modal BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilmi, Makhalul, 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Cetakan I. UU Press. Yogyakarta.
- Karim, Adiwarman, 2003, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cetakan I, IIT Indonesia, Jakarta.